



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2020



**BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
PERIKANAN AMBON**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja triwulan I tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja triwulan I tahun 2020 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2020. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama triwulan I tahun 2020, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang terdiri dari 4

sasaran strategis dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada tahun 2020, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2020 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

**Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon**



Praatma Prihadi

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Praatma Prihadi A.Pi, M.M

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekretaris :

Moh. Arief Hidayat A.Md

Anggota:

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

Wahyu Retno Aris S.St.Pi

Dessy Rompis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Gambaran Umum BPPP Ambon	7
1.4 Aspek Strategis Organisasi	17
1.5 Dasar Hukum	18
1.6 Potensi dan Permasalahan	20
1.7 Sistematika Laporan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis 2020 - 2024.....	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	26
2.3 Kegiatan Prioritas Tahun 2020.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja	32
3.2 Penjelasan Capaian IKU	40
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	57
3.4 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja	65
BAB IV PENUTUP.....	66
LAMPIRAN	

IKTISAR EKSEKUTIF

Sasaran kinerja yang dicapai pada triwulan I tahun 2020 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah menetapkan 4 (Empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2020. Dari 4 (Empat) Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 (Enam belas) indikator kinerja, yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan merupakan target kinerja Balai yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara

kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network/komunikasi*, sedangkan *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society 5.0* manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*transfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagai unit satuan kerja harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dibawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui

pelatihan dan sertifikasi;

2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah ditetapkan sampai tingkat daerah (satuan kerja).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban

menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2020 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PUSLATLUH KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program

jangka panjang dan menengah KKP khususnya program pelatihan dan penyuluhan KP sebagaimana tertuang dalam Renstra PUSLATLUH KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2020 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon kepada Kepala PUSLATLUH KP selaku

Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon triwulan I tahun 2020.

2. Memberi gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP pada triwulan I tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja triwulan I tahun 2020 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala PUSLATLUH KP selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon triwulan I tahun 2020.
2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.3 Gambaran Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan BPSDM KP Nomor : 46/KEP-BPSDMKP/2014, tanggal 20 Mei 2014 mempunyai Wilayah Kerja meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara. Wilayah Kerja Balai Pelatihan

dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar sehingga untuk pemanfaatannya dituntut pula peningkatan keterampilan sumberdaya manusia yang berkompeten dan berdedikasi tinggi dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan program peningkatan sumberdaya manusia yang menjadi sasaran pokok kegiatan pembangunan bangsa ke depan.

Dengan makin meningkatnya Pembangunan Perikanan di Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara maka BPPP Ambon semakin berperan untuk meningkatkan keterampilan para petugas pembangunan di bidang peningkatan SDM Perikanan. Hal itu sejalan dengan tujuan pembangunan di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang merupakan bagian integral dari pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya.

a. Tugas Pokok

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu unit eselon III di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2017, tanggal 30 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, unit ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan

kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya BPPP Ambon menyelenggarakan fungsi

- (1) Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- (2) Penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan;
- (3) Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- (4) Penyusunan Materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- (5) Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- (6) Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- (7) Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- (8) Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta; dan
- (9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugasnya melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan

dan rumah tangga serta pelaporan. Seksi Program dengan tugasnya melakukan penyiapan bahan penyusunan program anggaran pelatihan dan penyuluhan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan. Seksi Pelatihan dengan tugas melakukan persiapan kegiatan pelatihan. Seksi Penyuluhan dengan tugas melakukan kegiatan koordinasi dan melakukan administrasi dengan penyuluh wilayah kerja. Sedangkan kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan pelatihan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Susunan Organisasi

Gambaran Struktur Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon

d. Keragaan SDM

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Total Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon berjumlah 401 orang yang dipimpin oleh Kepala Balai, data pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah SDM BPPP Ambon

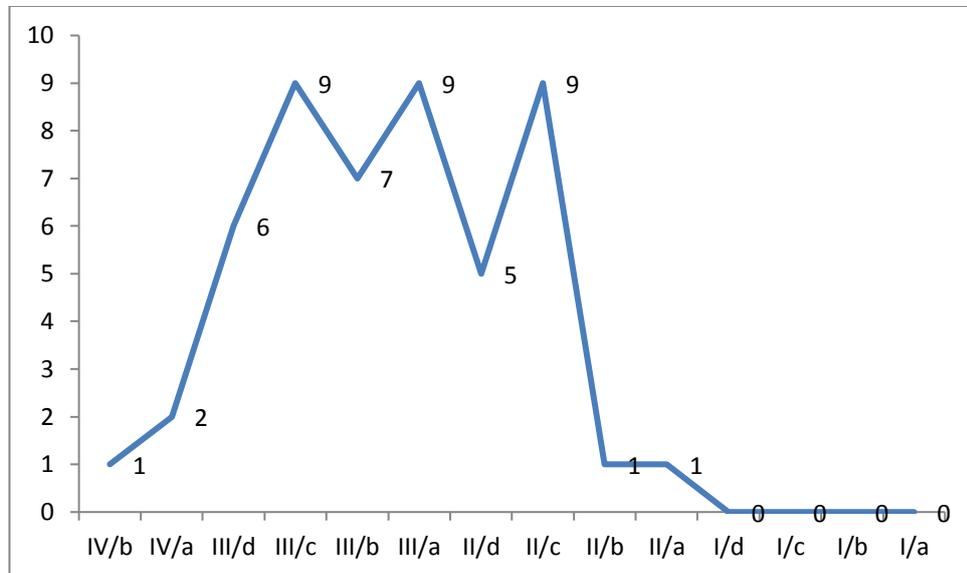
NO	BAGIAN	JUMLAH
1	Kepala Balai	1 Orang
2	Pejabat Struktural	4 Orang
3	Sub Bagian Tata Usaha	
	Kepegawaian	1 Orang
	Keuangan	5 Orang
	Rumah Tangga dan Perlengkapan	6 Orang
	Teknisi	6 Orang
4	Seksi Program	1 Orang
5	Seksi Pelatihan	1 Orang
6	Seksi Penyuluhan	2 Orang
7	Fungsional Tertentu :	
	Widyaiswara	5 Orang
	Instruktur	14 Orang
	Arsiparis	1 Orang
	Penyuluh	255 orang
8	Tenaga Kontrak	
	Tenaga Teknis	3 orang
	Pramubakti	5 orang
	Tenaga Sopir	2 orang
	Petugas Keamanan	4 orang
	Tenaga Dokter	1 orang
	Penyuluh Perikanan Bantu	4 orang
	Jumlah Total	401 Orang

Sumber : Kepegawaian BPPP Ambon

Dukungan sumberdaya manusia (SDM) pada kegiatan-kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dapat dilihat sebagai berikut:

➤ Menurut Golongan

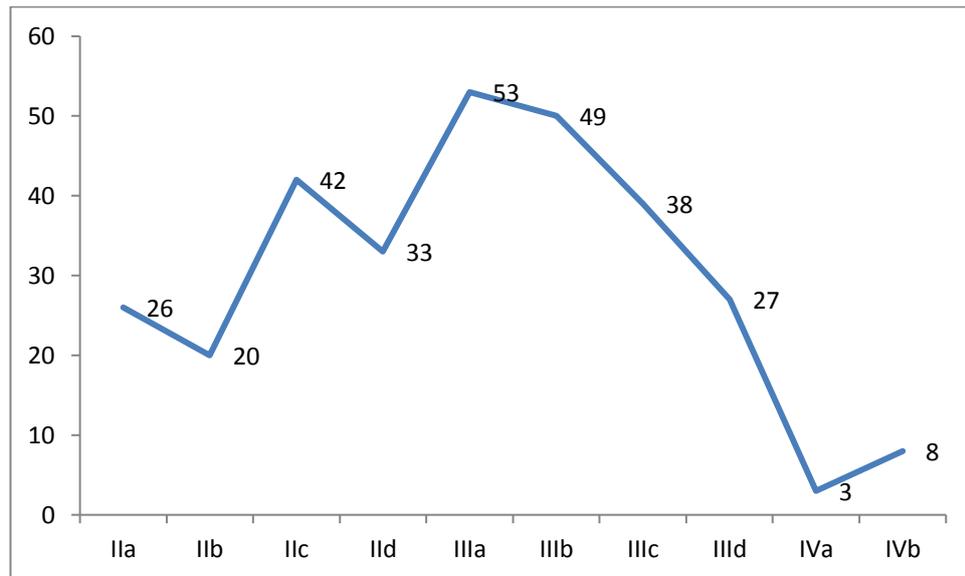
Jumlah orang



Grafik 1. Jumlah SDM BPPP Ambon menurut Golongan

Sesuai dengan grafik 1 diatas terlihat bahwa jumlah pegawai menurut golongan IV/b sebanyak 1 orang, IV/a sebanyak 2 orang golongan III/d sebanyak 9 orang, golongan III/c sebanyak 7 orang, golongan III/b sebanyak 8 orang, golongan III/a sebanyak 11 orang, golongan II/d sebanyak 6 orang, golongan II/c sebanyak 4 orang dan golongan II/b sebanyak 1 orang.

Jumlah orang

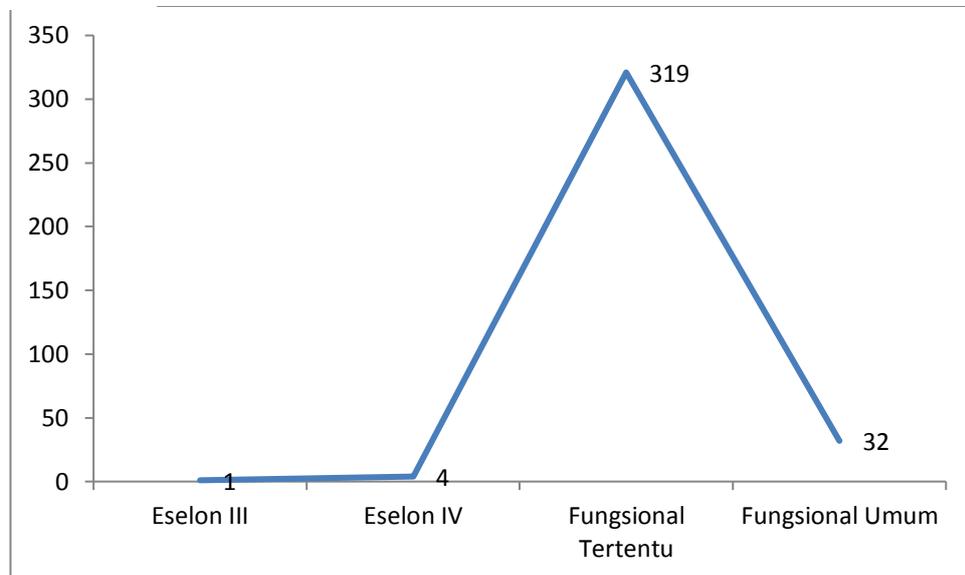


Grafik 2. Jumlah SDM Penyuluh Satminkal BPPP Ambon menurut Golongan

Sesuai dengan grafik 2 diatas terlihat bahwa jumlah penyuluh Satminkal BPPP Ambon menurut golongan IV/b sebanyak 8 orang, IV/a sebanyak 3 orang golongan III/d sebanyak 27 orang, golongan III/c sebanyak 38 orang, golongan III/b sebanyak 49 orang, golongan III/a sebanyak 53 orang, golongan II/d sebanyak 33 orang, golongan II/c sebanyak 42 orang, golongan II/b sebanyak 20 orang dan golongan II/a sebanyak 26 orang.

➤ Menurut Jenjang Jabatan

Jumlah orang

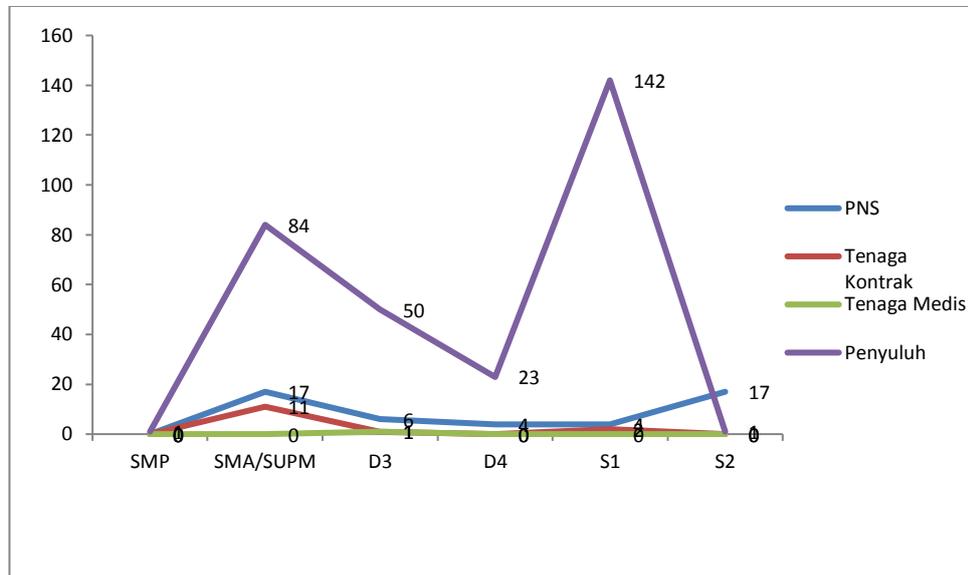


Grafik 3. Jumlah SDM menurut Jenjang Jabatan

Sesuai dengan Grafik 3 diatas terlihat Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon menurut jabatan struktural dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu eselon III sebanyak 1 orang, eselon IV sebanyak 4 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 312 orang yang terdiri dari 14 orang Instruktur, 5 orang Widyaiswara, 1 orang Arsiparis dan 292 orang penyuluh Satminkal serta fungsional umum sebanyak 32 orang.

➤ Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah orang

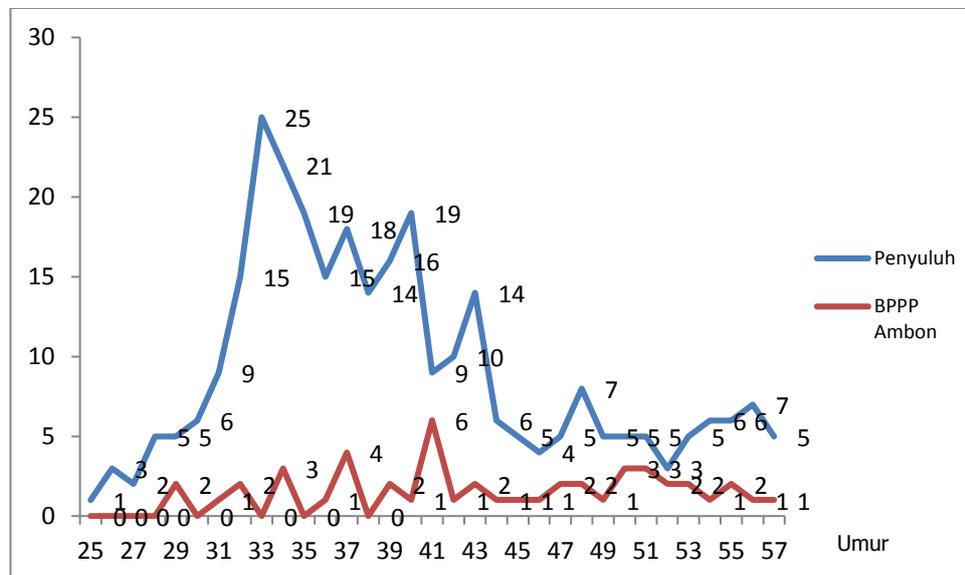


Grafik 4. Jumlah SDM menurut Jenjang Pendidikan

Sesuai dengan Grafik 4 di atas terlihat Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon menurut jenjang pendidikan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok yaitu S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 4 orang, D4 sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 17 orang. Sedangkan untuk penyuluh Satminkal S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 142 orang, D4 sebanyak 23 orang, D3 sebanyak 50 orang, SMA/SUPM sebanyak 84 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

➤ Menurut Usia

Jumlah orang



Grafik 5. Jumlah SDM menurut Usia

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon merupakan salah satu unit kerja dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM KP yang mampu mewujudkan sektor

kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

Kebijakan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan strategis pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pelatihan dan penyuluhan adalah :

- a. Pelatihan Masyarakat KP
 - Program BRSDM KP
 - Program Eselon I lainnya
 - Program Prioritas KKP
- b. Sertifikasi Kompetensi Masyarakat KP

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tahun 2016 dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERM-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- i. Keputusan Kepala BPPP Ambon Nomor KEP.21/BPPP/KP/.110/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon tahun 2020.

1.6 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.6.1 Potensi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memiliki wilayah kerja yang meliputi 5 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Dengan wilayah kerja yang sangat luas tersebut dan memiliki potensi kekayaan perikanan yang sangat besar, maka peningkatan Sumber Daya Manusia di wilayah tersebut sangat diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam khususnya di bidang perikanan. Untuk jumlah nelayan dan pembudidaya di wilayah kerja BPPP Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Jumlah Nelayan tangkap ikan, Pembudidaya ikan dan Pengolah hasil perikanan di Wilayah Kerja

No.	Provinsi	Jumlah Nelayan (Orang)	Jumlah Pembudidaya (Orang)	Jumlah Pengolah (Orang)
1	Sulawesi Tenggara	83.970	130.608	352
2	Maluku	124.914	54.870	503
3	Maluku Utara	16.607	6.020	234
4	Papua	78.568	15.678	141
5	Papua Barat	31.741	14.547	192
TOTAL		335.800	221.723	1.422

Sumber : Satu Data Indonesia 2018

1.6.2 Permasalahan

Dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar pada wilayah kerja BPPP Ambon, maka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama perikanan perlu dilakukan. Untuk dapat menjangkau seluruh lapisan sumberdaya manusia diwilayah kerja, tetap mengalami permasalahan yaitu memerlukan waktu dana anggaran yang tinggi, ada lokasi wilayah kerja dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau yang hanya dapat diakses dengan perjalanan laut dan udara serta penjadwalan transportasi tersebut yang masih bergantung dengan kondisi alam sehingga tidak semua lokasi di wilayah kerja dapat dilakukan pelatihan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi, aspek strategis organisasi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi serta potensi dan permasalahan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.
- b. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 serta Pengukuran Kinerja.

- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
- d. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait kesimpulan, permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam perencanaan strategis periode lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 berisi langkah-langkah strategis yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka menunjang visi Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :

a. Visi

Visi BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP, visi BRSDM dan visi Puslatluh KP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

b. Misi

Misi BPPP Ambon adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM dan Puslatluh KP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

c. Tugas

Penjabaran visi dan misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka ditetapkan tugas Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan Teknis dan Manajerial di Bidang usaha perikanan.

d. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2017 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, maka fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah :

1. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan
2. Penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan
3. Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan
4. Penyusunan Materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan
5. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan
6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan
7. Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha

8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta
 9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- e. Rencana Kinerja Tahun 2020-2024

Rencana Kinerja Tahunan pada dasarnya adalah dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana tekad dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ditelitinya sesuai dengan rencana kinerja pemerintah. Rencana Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2020 sampai dengan 2024 membandingkan target yang telah ditetapkan setiap tahun sehingga terlihat kenaikan atau penurunan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2016 s.d 2019

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS BPPP AMBON	NO	IKU	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
							2020	2021	2022	2023	2024
1	SS1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	SS 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	kelompok	2673	2773	2873	2973	3000
				2	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya	kelompok	65	67	69	71	73
				3	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan	kelompok	97	97	97	97	97
3	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	SS 3. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	4	Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	orang	699	1759	1859	1959	2000
				5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	15	16	17	18	20
				6	Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi	orang	0	250	300	350	400
				7	Masyarakat KP yang dilatih	orang	1165	1900	1900	1900	10000
				8	Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan	unit	1	5	6	7	8
				9	Sarana dan prasarana BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	0	1	1	1	1

LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TRIWULAN I TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	SASARAN STRATEGIS BPPP AMBON	NO	IKU	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
							2020	2021	2022	2023	2024
				10	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat	lembaga	1	1	1	1	1
4	SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	SS 4 . Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	11	Jumlah desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP	paket	1	1	1	1	1
5	SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik	SS 5. Tatakelola pemerintahan yang baik	SS 5. Tatakelola pemerintahan yang baik	12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRSDM (indeks)	Indeks	72	72	72	72	72
				13	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BRSDMKP (%)	%	82	82	82	82	82
				14	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRSDM (nilai)	Nilai	Baik (88)				
				15	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK 2019 dibandingkan realisasi anggaran TA. 2019 (%)	%	1	1	1	1	1

f. Perjanjian Kinerja

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun "Perjanjian Kinerja" berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 5) sebagai dasar pemberian *reward* atau *punishment*. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2020. Substansi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun Perjanjian Kinerja (PK) memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020.

Secara rinci Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memiliki 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut ditetapkan melalui tahapan-tahapan program berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 4 (empat) perspektif, yaitu :

1. STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

- Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

2. CUSTOMERS PERSPECTIVE

- Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

3. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat

4. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

- Tatakelola pemerintahan yang baik

Dokumen perjanjian kinerja (PK) merupakan salah satu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, memuat pernyataan kesanggupan pencapaian kinerja, serta mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen

perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP
3. Menilai keberhasilan organisasi

Pada setiap akhir periode tahun anggaran, dokumen perjanjian kinerja akan diukur pencapaiannya, dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BPPP Ambon tahun 2020 dilakukan pengukuran dengan *Balanced Scorecard* (BSC) dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditargetkan pada pelaksanaan kegiatan BPPP Ambon tahun 2020. *Balanced Scorecard* (BSC) adalah sebuah perencanaan strategis dan sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan industri, pemerintah dan organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk kegiatan usaha untuk menyelaraskan visi dan strategis organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, serta memantau kinerja organisasi terhadap strategis tujuan. Dalam *Balanced Scorecard* (BSC), kinerja strategis organisasi diukur secara seimbang antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang serta kinerja yang bersifat internal dan eksternal. Perjanjian kinerja Balai

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020 terdiri dari 4 Sasaran Strategis (SS) dan 16 Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	2,673
		Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	87
		Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	97
2	Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa)	1
3	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (orang)	1,659
		Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (orang)	15
		SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	2,765
		Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Ambon (orang)	200
		Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (unit)	4
		Sarana dan prasarana Puslatluh yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (unit)	1
		Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Ambon (lembaga)	1
		Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit)	544
4	Tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon (indeks)	72
		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (%)	82
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	Baik (88)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA. 2019 (%)	1

2.3 Kegiatan Prioritas Tahun 2020

Adapun kegiatan prioritas Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dikelompokkan menjadi 2 (dua) kinerja utama yaitu :

1. Pelatihan Masyarakat

Pelatihan masyarakat akan difokuskan kepada pelatihan-pelatihan yang mendukung kegiatan prioritas KKP sebanyak 2.765 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Program dukungan pelatihan

No.	Nama Dukungan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Masyarakat di Balai	150
2	Pelatihan Masyarakat melalui Safari	1.950
3	Program Keahlian Bidang KP	265
4	Pelatihan Teknis Bidang KP	400
TOTAL		2.765

Sumber : Seksi Pelatihan BPPP Ambon

2. Sertifikasi Kompetensi Masyarakat KP

Kegiatan sertifikasi kompetensi kepada pelaku utama dan pekerja di Industri perikanan dimaksudkan untuk melindungi mereka dari persaingan dengan tenaga kerja asing, selain itu memastikan tenaga kerja dibidang perikanan memang benar - benar kompeten untuk melakukan pekerjaannya dengan target peserta sertifikasi kompetensi sebanyak 200 orang pelaku utama dan pekerja di Industri.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I tahun 2020

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi yang telah dicapai oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran strategis dan IKU BPPP Ambon pada tahun 2020 merupakan hasil turunan langsung dari *cascading* dari Subbag Tata Usaha, Seksi Pelatihan, Seksi Penyuluhan dan Seksi Program Monitoring dan Evaluasi, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi Perjanjian Kinerja Subbag Tata Usaha

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TW I
1	Kapasitas dan Kompetensi SDM KP yang Meningkatkan	Tersedianya laporan pelaksanaan Sarana dan prasarana Puslatluh yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (dokumen)	1	0
		Tersedianya data dukung untuk sertifikasi ISO kelembagaan pelatihan dan penyuluhan di BPPP Ambon (dokumen)	1	0
		Tersedianya laporan Pembayaran Honorarium dan BOP Penyuluh Perikanan Tahun 2020 (Dokumen)	4	1
		Tersedianya laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Penyuluh Perikanan Tahun 2020 (Dokumen)	4	1
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Kinerja ASN Subbag Tata Usaha BPPP Ambon (Nilai)	76	92
		Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan ASN (%)	56	0
		Kesesuaian Kompetensi ASN PUSLATLUH KP (%)	37,5	0
		Nilai Kinerja ASN PUSLATLUH KP (%)	87	0
		Nilai Disiplin ASN PUSLATLUH KP (%)	98	0
		Persentase Realisasi Anggaran Subbag Tata Usaha BPPP Ambon (%)	90	17,59
		Dokumen penyampaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Dokumen)	12	1
		Penyiapan rancangan dokumen tanggapan terhadap temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon TA 2019 (Dokumen)	1	0

Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja Seksi Pelatihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TW I
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	Tersedianya rekapitulasi data lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (dokumen)	1	0
		Tersedia data SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (dokumen)	4	1
		Tersedianya data SDM KP yang memiliki sertifikat Kompetensi dari jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi yang tervalidasi di BPPP Ambon (dokumen)	1	0
2	Terlaksananya dukungan manajemen untuk RB BRSDM	Nilai Kinerja ASN Seksi Pelatihan BPPP Ambon (Nilai)	76	91
		Persentase Realisasi Anggaran Seksi Pelatihan BPPP Ambon (%)	90	11,67

Tabel 8. Realisasi Perjanjian Kinerja Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TW I
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	Tersedianya rekapitulasi data lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (dokumen)	1	0
		Tersedianya dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2021 Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan (Dokumen)	1	0
		Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan (Dokumen)	1	1
		Tersedianya laporan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPP Ambon Th 2020 - 2024 (Dokumen)	1	0
2	Tatakelola pemerintahan yang baik	Pemenuhan dokumen MP yang sudah diupload dalam aplikasi Btrix	20	10
		Keikutsertaan MP dalam aplikasi Btrix	32	18
		Keaktifan MP dalam aplikasi Btrix	30	25
		Nilai Kinerja ASN Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi BPPP Ambon (Nilai)	76	92
		Persentase Realisasi Anggaran Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi BPPP Ambon (%)	90	2,50

Tabel 9. Realisasi Perjanjian Kinerja Seksi Penyuluhan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TW I
1	Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP (SS1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP)	Tersedia data kelompok yang dinilai kelas kelompoknya yang tervalidasi di BPPP Ambon (dokumen)	1	0
2	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	Tersedianya laporan desa mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (dokumen)	1	0
		Tersedia data calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan yang tervalidasi di BPPP Ambon (dokumen)	4	1
		Tersedianya laporan pelaksanaan Percontohan Penyuluhan di BPPP Ambon (dokumen)	4	0
3	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan	Tersedia data SDM KP yang disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan yang sudah tervalidasi di BPPP Ambon(dokumen)	4	1
		Tersedia data laporan pelaksanaan pembinaan usaha mikro kecil dan Koperasi Sektor KP oleh Penyuluh Perikanan di BPPP Ambon (dokumen)	4	1
4	Terlaksananya dukungan manajemen untuk RB BRSDM	Nilai Kinerja ASN Seksi Penyuluhan BPPP Ambon (Nilai)	76	89
		Persentase Realisasi Anggaran Seksi Penyuluhan BPPP Ambon (%)	90	13,75

Tabel 10. Realisasi Perjanjian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TW I
1	Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	2,673	650
		Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	87	0
		Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)	97	7
2	Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa)	1	0
3	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (orang)	1,659	0
		Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (orang)	15	0
		SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	2,765	510
		Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Ambon (orang)	200	0
		Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (unit)	4	0
		Sarana dan prasarana Puslatluh yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (unit)	1	0
		Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Ambon (lembaga)	1	0
		Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit)	544	58

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TW I
4	Tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon (indeks)	72	0
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (%)		82	53	
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)		Baik (88)	0	
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA. 2019 (%)		1	0	

1.2 Penjelasan Capaian IKU

A. *Stakeholder Perspective*

Stakeholder Perspective lebih menekankan pada apa yang diharapkan oleh masyarakat

- 1) Sasaran Strategis 1 (SS1) : Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

Untuk mencapai sasaran strategis Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP terdapat 3 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1 : Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok), IKU 2 : Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon (kelompok) dan IKU 3 : Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon (kelompok).

- a) IKU 1 : Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah kelompok SDM yang disuluh mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan melalui penyelenggaraan penyuluhan. Penghitungan dilakukan dengan

cara menjumlahkan Kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang disuluh.

IKU ini merupakan IKU penyuluhan yang sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 34.500 orang.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Penyuluhan, sampai akhir Triwulan I Tahun 2020 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan penyuluhan sebanyak 650 kelompok dari target kelompok yang disuluh sebanyak 2.673 kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data dukung capaian IKU kinerja tahun 2020.



Gambar 22. Penyuluhan di Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara



Gambar 23. Penyuluhan di Kab. Merauke Prov. Papua

b) IKU 2 : Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dinilai kelas kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

IKU ini merupakan IKU penyuluhan yang sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, namun merupakan target antara Seksi Penyuluhan dengan penyuluh Satminkal dengan target sebanyak 70 % penyuluh yang melakukan penilaian kelas kelompok. Pada tahun 2019 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai 1.462 unit.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Penyuluhan, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan. sampai akhir Triwulan I Tahun 2020, Penyuluh Satminkal BPPP ambon masih melakukan pendataan calon kelompok yang akan dinilai kelas kelompoknya sehingga nilai pencapaian pada Triwulan I Tahun 2020 masih 0 kelompok.

- c) IKU 3 : Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon (kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah calon kelompok pelaku utama yang diusulkan menjadi kelompok Pelaku utama setelah mendapatkan penyuluhan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Penyuluhan, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah calon kelompok yang diusulkan menjadi kelompok Pelaku utama yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok. sampai akhir Triwulan I Tahun 2020, Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan penumbuhan kelompok baru sebanyak 7 kelompok dari target kelompok yang ditumbuhkan sebanyak 97 kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data dukung capaian IKU kinerja tahun 2020.

B) Customer Perspective

Customer Perspective merupakan kegiatan yang berorientasi pada apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat.

1) Sasaran Strategis 2 (SS2) : Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

Untuk mencapai Sasaran Strategis Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan terdapat 1 (satu) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 4 : Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa).

a) IKU 4 : Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (desa)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014).

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna. Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft) pengetahuan untuk penggunaan praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya. Desa mitra adalah desa

komunitas kp yang memanfaatkan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kp.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020. IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Penyuluhan, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan tahun 2020 yang dibuktikan dengan MOU/PKS antara Kepala Badan RSDMKP dengan Bupati/Walikota. sampai akhir Triwulan I Tahun 2020, Penyuluh Satminkal BPPP ambon masih melakukan pendataan calon desa yang akan melakukan kerjasama dengan BPPP Ambon untuk menerapkan Iptek KP sehingga nilai pencapaian pada Triwulan I Tahun 2020 masih 0 Desa.

C). INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Internal Process Perspective berfokus pada semua kegiatan dan proses kunci yang diperlukan agar instansi unggul dalam memberikan nilai yang diharapkan oleh masyarakat.

1). Sasaran Strategis 3 (SS3) : Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat terdapat 8 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 5 : Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di

BPPP Ambon (orang), IKU 6 : Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (orang), IKU 7 : SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (orang), IKU 8 : Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Ambon (orang), IKU 9 : Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (unit), IKU 10 : Sarana dan prasarana Puslatluh yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (unit), IKU 11 : Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Ambon (lembaga) dan IKU 12 : Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit).

a) IKU 5 : Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (orang)

Merupakan indikator yang menggambarkan Jumlah lulusan pelatihan yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan di DUDI.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020. IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Program, Monitoring dan Evaluasi, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih. Sampai akhir Triwulan I Tahun 2020, BPPP ambon masih melakukan pendataan lulusan pelaku

utama/usaha yang akan menerapkan hasil pelatihannya sehingga nilai pencapaian pada Triwulan I Tahun 2020 masih 0 orang.

b) IKU 6 : Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon (orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) dan atau membuat jejaring pasar.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020. IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Pelatihan, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih. Sampai akhir Triwulan I Tahun 2020, BPPP ambon masih melakukan pendataan pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya sehingga nilai pencapaian pada Triwulan I Tahun 2020 masih 0 orang.

c) IKU 7 : SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon (orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilatih dibidang kelautan dan perikanan.

Realisasi IKU pada tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 6.784 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2015 sebanyak 2.992 orang, pada tahun 2016 sebanyak 840 orang, pada tahun 2017 sebanyak 840 orang, pada tahun 2018 sebanyak 1.712 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 400 orang.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Pelatihan, Sampai akhir Triwulan I Tahun 2020 sudah dilakukan pelatihan masyarakat sebanyak 17 angkatan sehingga pencapaian secara keseluruhan sebanyak 510 orang purnawidya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data dukung capaian IKU kinerja tahun 2020.



Gambar 6. Kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan Nila Di Kab. Sorong Prov. Papua barat



Gambar 7. Kegiatan Pelatihan Penanganan Ikan Diatas Kapal Di Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara



Gambar 8. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Julung di Kab. Seram Bagian Timur Prov. Maluku



Gambar 9. Kegiatan Pelatihan Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Penggerak Utama Kapal di Kota Kendari

d) IKU 8 : Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Ambon (orang)

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM KP yang mengikuti sertifikasi kompetensi. Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari SDM KP yang mengikuti sertifikasi kompetensi.

Merupakan IKU yang tidak ada pada tahun 2018, akan tetapi ada pada tahun 2016 dan 2017 dan 2019 dengan realisasi pada tahun 2016 sebanyak 4.480 orang, pada tahun 2017 sebanyak 840 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 300 orang.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Pelatihan. Sampai akhir Triwulan I Tahun 2020, BPPP ambon masih melakukan pendataan calon peserta sertifikasi kompetensi sehingga nilai pencapaian pada Triwulan I Tahun 2020 masih 0 orang.

- e) IKU 9 : Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon (unit)

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan. Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan Identifikasi jumlah percontohan penyuluhan KP. IKU ini sudah ada pada tahun 2019 dengan pencapaian sebanyak 2 kelompok. IKU ini juga merupakan turunan dari IKU Seksi Penyuluhan. Sampai akhir Triwulan I Tahun 2020, BPPP ambon masih melakukan pendataan calon kelompok yang akan dijadikan percontohan penyuluhan KP sehingga nilai pencapaian pada Triwulan I Tahun 2020 masih 0 orang.

- f) IKU 10 : Sarana dan prasarana, pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta kelembagaan yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada sejak tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebanyak 1 unit dan pada tahun 2019 sebanyak 1 unit.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, Sampai akhir Triwulan I Tahun 2020, BPPP ambon masih melakukan perencanaan sarana dan prasarana yang akan ditingkatkan kapasitasnya sehingga nilai pencapaian pada Triwulan I Tahun 2020 masih 0 unit.

- g) IKU 11 : Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Ambon (lembaga)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terstandar. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada sejak tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebanyak 1 unit dan pada tahun 2019 sebanyak 1 unit.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha. Sampai akhir Triwulan I Tahun 2020, BPPP ambon masih melakukan perencanaan sertifikasi kelembagaan sesuai dengan standar Lembaga diklat dan biasanya akan dilakukan surveilence oleh TUV SUD pada akhir tahun 2020 sehingga nilai pencapaian pada Triwulan I Tahun 2020 masih 0 lembaga.

- h) IKU 12 : Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah usaha mikro kecil dan pendirian koperasi sektor KP yang dibina oleh penyuluh Satminkal BPPP Ambon.

IKU ini merupakan IKU penyuluhan yang sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di BPPP Ambon pada tahun 2017, namun merupakan target antara Seksi Penyuluhan dengan penyuluh Satminkal dengan target sebanyak 70 % penyuluh yang melakukan legalisasi izin usaha mikro kecil dan pendirian koperasi sektor KP dedaung pada tahun 2019 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai 647 unit.

IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Penyuluhan, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah usaha mikro kecil dan koperasi sektor KP yang dibina oleh penyuluh Satminkal BPPP Ambon yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan Satminkal BPPP Ambon. sampai akhir Triwulan I Tahun 2020 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil sebanyak 58 unit dari target kelompok yang disuluh sebanyak 544 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data dukung capaian IKU kinerja tahun 2020.

D.) LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Learning and Growth Perspective adalah kegiatan yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

1) Sasaran Strategis 4 (SS4) : Tatakelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis Tatakelola pemerintahan yang baik terdapat 4 Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 13 : Indeks profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon, IKU 14 : Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (%), IKU 15 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai) dan IKU 16 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA. 2019 (%)

a) IKU 13 : Indeks profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon.

Indeks profesionalitas ASN dimaksud terdiri dari Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 81,51 % dan tahun 2018 sebesar 93,25% dan tahun 2019 sebesar 75,88%. Perhitungan ini juga dapat dilihat

melalui website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon> dengan perhitungan nilai sebagai berikut :

$$= \text{Indeks kualifikasi pendidikan ASN} + \text{Indeks disiplin ASN} + \text{Indeks kinerja ASN} + \text{Indeks kompetensi ASN}$$

IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai akhir Triwulan I Tahun 2020 BPPP ambon masih melakukan pendataan, sosialisasi tentang komponen yang harus diisi pada aplikasi epegawai yang akan terhubung dengan Ropég KKP oleh setiap ASN BPPP Ambon sehingga nilai pencapaian pada Triwulan I Tahun 2020 masih 0.

b) IKU 14 : Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Jumlah unit kerja yang tergabung dalam media yang *menshared* data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi *Btrix*. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 70,80 % dan tahun 2018 sebesar 95,23% dan tahun 2019 sebesar 100%.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi, sampai akhir Triwulan I Tahun 2020 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini oleh PUslat KP dan diperoleh nilai sebagai berikut :

- = Pemenuhan Dokumen MP yang sudah diupload dalam aplikasi Btrix + Keikutsertaan MP dalam aplikasi Btrix +Keaktifan MP dalam aplikasi Btrix
- = 10 + 18+ 25
- = 53%

c) IKU 15 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83% dan pada tahun 2019 sebesar 95,39%

IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi, sampai akhir Triwulan I Tahun 2020, berdasarkan arahan dari Sekertariat BRSDM KP untuk tidak melakukan penghitungan IKU ini

dikarenakan masih menunggu petunjuk teknis tentang pola perhitungan IKU ini sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

d) IKU 16 : Nilai Tertinggi Temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPP Ambon TA. 2018

Merupakan indikator batas tertinggi presentase temuan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPP Ambon dibandingkan realisasi tahun 2018.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebesar 0 % dan pada tahun 2019 juga sebesar 0%.

IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BRSDM KP sehingga pencapaian IKU BPPP Ambon mengikuti hasil perhitungan pencapaian IKU BRSDM KP yaitu 0 %

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, maka diperlukan dilaporkan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan jenis belanja serta capaian realisasi anggaran tahun 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020 berdasarkan aplikasi OM SPAN.

Tabel 11. pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan jenis belanja

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN							
		2015			2016				
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Self Bloking	% Realisasi setelah SB
1	Belanja Pegawai	4,688,951,000	4,668,497,895	99.56	5,255,551,000	5,250,159,670	99.90	0	99.90
2	Belanja Barang	14,114,351,000	13,964,779,078	98.94	25,651,312,000	11,354,872,941	44.27	14,267,123,000	99.89
3	Belanja Modal	9,121,573,000	9,069,004,610	99.42	1,760,902,000	360,710,750	20.48	1,384,006,000	99.08
TOTAL		27,924,875,000	27,702,281,583	99.20	32,667,765,000	16,965,743,361	51.93	15,651,129,000	99.84

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN							
		2017			2018				
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Refining	% Realisasi setelah Refining
1	Belanja Pegawai	5,980,937,000	5,946,273,046	99.42	43,564,328,000	42,220,667,388	96.92	0	96.92
2	Belanja Barang	5,310,755,000	5,306,894,559	99.93	12,200,958,000	9,960,505,265	81.64	1,560,965,000	99.43.00
3	Belanja Modal	69,579,000	69,579,000	100.00	380,000,000	379,890,000	99.97	0	99.97
TOTAL		11,361,271,000	11,322,746,605	99.66	56,145,286,000	52,561,062,653	93.62	1,560,965,000	96.40.00

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN			
		2019			2020
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu
1	Belanja Pegawai	45,048,824,000	42,492,874,519	94,33	38.051.276.000
2	Belanja Barang	13,638,084,000	11,332,310,689	83,09	15.620.825.000
3	Belanja Modal	1,025,000,000	1,023,650,117	99,87	3.200.000.000
TOTAL		59,711,908,000	54,848,835,325	91,86	56.872.101.000

Tabel 12. Capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 03 April 2020 berdasarkan aplikasi OM SPAN

KODE	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	56.872.101.000	9.428.565.755	47.443.535.245	16,58
2375.001	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	7.634.010.000	904.458.198	6.729.551.802	11,85
2375.002	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi	120.000.000	-	120.000.000	-
2375.004	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	5.007.893.000	728.398.954	4.279.494.046	14,55
2375.006	Sarana Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.200.000.000	-	3.200.000.000	-
2375.008	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan	333.176.000	6.000.000	327.176.000	1,80
2375.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	356.639.000	103.620.711	253.018.289	29,05
2375.970.001	Layanan Perencanaan dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan	71.000.000	2.997.448	68.002.552	4,22
2375.970.002	Layanan Ketatausahaan	285.639.000	100.623.263	185.015.737	35,23
2375.994	Layanan Perkantoran	40.220.383.000	7.686.087.892	32.534.295.108	19,11
001	Gaji dan Tunjangan	38.051.276.000	7.285.042.651	30.766.233.349	19,15
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.169.107.000	401.045.241	1.768.061.759	18,49

Tabel diatas merupakan realisasi berdasarkan kegiatan, untuk detail realisasi anggaran per mata akun dapat dilihat pada lampiran

3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM KP bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian tersebut. Dengan bergabungnya 255 orang penyuluh perikanan Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat juga memiliki beberapa permasalahan antara lain :

Tabel 13. Permasalahan Penyuluh Satminkal

No.	KENDALA
1	Penerapan mekanisme <i>punishment</i> (Hukuman Disiplin) bagi Penyuluh masih rendah sehingga kesalahan yang dilakukan cenderung berulang.
2	Kompetensi teknis dan manajerial sebagian besar Penyuluh yang masih rendah, mempengaruhi performance penyuluh di lapangan.
3	Faktor geografis yang luas menyebabkan kesulitan dalam mengontrol kinerja penyuluh.
4	Birokrasi yang panjang menyebabkan keterlambatan dalam realisasi pekerjaan. Contoh : SK Hukuman Disiplin, PAK Penyuluh, SK Pensiun, SK Kenaikan pangkat/Jabatan, Penilaian Kinerja, dll.

BAB IV

PENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Capaian kinerja utama BPPP Ambon pada triwulan I tahun 2020 sudah sesuai dengan target rencana aksi per bulan yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2020. Ada 11 IKU yang pencapaiannya masih 0 yaitu IKU 2 : Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Ambon dikarenakan masih dalam tahap identifikasi kelompok pelaku utama perikanan, IKU 4 : Desa mitra/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP yang masih melakukan identifikasi calon desa mitra yang akan menerapkan Iptek KP, IKU 5 : Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru yang masih dilakukan tahap identifikasi lulusan peserta pelatihan, IKU 8 : Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi dengan masih melakukan identifikasi calon peserta sertifikasi kompetensi, IKU 10 : Sarana dan prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya masih dilakukan identifikasi peningkatan sarana dan prasarana, IKU 11 : Sertifikasi kelembagaan pelatihan dan penyuluhan sesuai standar Lembaga diklat dengan dilakukan surveilence dari TUV SUD pada akhir tahun 2020, IKU 13 : Indeks profesionalitas ASN dengan masih melakukan penginputan data kepegawaian, IKU 15 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran juga masih menunggu petunjuk teknis dari Sekertariat BRSDM KP tenang

mekanisme penilaian dan IKU 16 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon T.A 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat BRSDM KP pada kahir tahun 2020.

4.2 MASALAH DAN REKOMENDASI TINDAKLANJUT

A. Masalah

1. Masih belum tersedianya petunjuk teknis lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru, sehingga pelatih pada saat pelatihan akan mengamati secara cermat potensi para peserta yang nantinya akan membentuk rintisan usaha baru .
2. Capaian IKU SDM KP yang dilatih dikhawatirkan tidak akan mencapai target terkendala perolehan calon peserta BST, hal ini disebabkan calon peserta BST sudah terserap pada penyelenggaraan pelatihan tidak membayar oleh Hubla dan rata-rata calon peserta hanya berijazah SD.
3. Target kegiatan prioritas beresiko tidak tercapai dikarenakan pelatihan tatap muka di kelas tidak bisa dilaksanakan diakibatkan pandemic covid-19 .

B. Rekomendasi Tindaklanjut

1. Melakukan koordinasi secara intensif kepada Puslatluk KP tentang petunjuk teknis lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru sehingga instrument yang akan dinilai pada masing-masing calon peserta akan sama.
2. Memaksimalkan promosi pelatihan BST melalui jejaring sosial dan media cetak serta melakukan kerjasama pelatihan BST dengan Dinas Perikanan Wilayah Kerja BPPP Ambon.
3. Pelatihan dilaksanakan secara online sehingga target pelatihan tetap terlaksana dan tujuan peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan tetap tercapai.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Praatma Prihadi**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Maman Hermawan**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua

Plt. Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Maman Hermawan

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Praatma Prihadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP melalui penyediaan SDM KP yang kompeten	1	Jumlah lulusan pelatihan yang kompeten meningkat pendapatannya (orang)	240
		2	Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat kelasnya (kelompok)	65
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	3	Nilai PNBP BPPP Ambon (Rp. Miliar)	0,328
		4	Jumlah pelaku utama/usaha lulusan pelatihan berbasis kompetensi (orang)	400
		5	Jumlah anggota kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh yang dinilai kelas kelompoknya (orang)	1.300
		6	Legalisasi Izin Usaha Mikro Kecil dan Pendirian Koperasi Sektor KP (unit)	524
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan	7	Jumlah Masyarakat KP yang dilatih (orang)	3.610
		8	Jumlah Pelaku utama/ usaha yang disuluh (orang)	34.230
		9	Jumlah SDM KP yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi (Orang)	300
		10	Jumlah Profil Kelompok Pelaku utama/ usaha yang disusun (Dokumen)	3.423
		11	Jumlah lembaga Pelatihan dan Penyuluhan yang terstandar (lembaga)	1
		12	Jumlah sarana dan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)	1
		13	Persentase Penyuluh perikanan yang berkontribusi terhadap pelaksanaan program KKP (%)	100
		14	Tersedianya Metode Percontohan Penyuluhan KP (lokasi)	2

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2019
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya aparatur sipil negara BPPP Ambon yang kompeten, profesional, dan berintegritas	15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon (indeks)	71
5	Tersedianya manajemen pengetahuan BPPP Ambon yang handal dan mudah diakses	16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (%)	80
6	Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BPPP Ambon yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (%)	80
7	Terkelolanya anggaran pembangunan BPPP Ambon secara efisien dan akuntabel	18	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (%)	Baik (87)
		19	Batas Tertinggi temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA 2018 (%)	1

Kegiatan : Pelatihan Dan Penyuluhan KP
 Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp 59.711.908.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua

Plt. Kepala Pusat Pelatihan dan
 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan



Maman Hermawan

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
 Penyuluhan Perikanan Ambon



Praatma Prihadi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA KODE POS 97233 TELUK AMBON
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711
Website : bp3ambon-kkp.org
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPPP AMBON
NOMOR : KEP.21/BPPP/KP.110/II/2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2019
DAN TRIWULAN TAHUN 2020 BPPP AMBON

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2020 dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 dan Triwulan Tahun 2020.
2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada BPPP Ambon.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 27/PERMEN-KP/2017 tanggal 27Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 20/MEN-SJ/KP.430/VI/2017 tanggal 16Juni 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Setara Eselon III Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut dalam kolom 2 dan 3 pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada BPPP Ambon.

Kedua

- Kedua** : Biaya untuk keperluan Laporan Kinerja (LKj) dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2020 tanggal 12 November 2019 BPPP Ambon T.A. 2020.
- Ketiga** : Kepada mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut pada amar pertama, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala BPPP Ambon.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Balai Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,



Praatma Prihadi, A.Pi, M.M.
NIP. 19631031 198703 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
UP. – DIRJEN Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
4. Sekretaris Badan Riset SDMP-KP di Jakarta.
5. Kapus Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah XXIX Dirjen Anggaran Ambon di Ambon.
8. KPPN Ambon di Ambon.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran BPPP Ambon
Nomor : KEP.21/BPPP/KP.110/II/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
BPPP Ambon T.A. 2020**

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas / Keterangan
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data / Ketua	merencanakan, menyusun, memeriksa LKj dan mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Program Dan Monev
2.	Pirhel, S.Sos, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari subbagian Tata Usaha
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Pelatihan
4.	A.R. Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Penyuluhan
6.	Moh. Arief Hidayat, A.Md	Sekretaris	menyusun laporan kinerja (LKj)
7.	Fiona A.B. Nikyuluw, S.Pi, M.Si	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)
8.	Dessy Rompis	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)
9.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	Anggota	membantu menyusun laporan kinerja (LKj)

Kepala Balai Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Praatma Prihadi, A.Pi, M.M
NIP. 19631031-198703 1 001